



Pemanfaatan Data *Beneficial Ownership* untuk Penanganan Perkara, Perizinan, dan Pengadaan Barang dan Jasa

disampaikan dalam
Focus Group Discussion
“Percepatan Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi
Penguatan Basis Data *Beneficial Ownership*”

Jakarta, 13 Juli 2021



Urgensi Transparansi BO

Jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar

1 % rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3 % dari seluruh kekayaan di Indonesia (laporan Bank Dunia 2015 “ketimpangan yang semakin lebar”)

PERSENTASE PENGUASAAN KEKAYAAN OLEH 1 PERSEN RUMAH TANGGA TERKAYA

Dalam laporan yang diterbitkan Bank Dunia, disebutkan bahwa 1 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen dari seluruh kekayaan di negeri ini. Dibandingkan dengan negara lain, penguasaan kekayaan oleh 1 persen rumah tangga terkaya di Indonesia masih kalah dengan ketimpangan yang terjadi di Rusia dan Thailand.



Sumber: Litbang “Kompas”/DEW/SAP, disarikan dari laporan terbitan Bank Dunia berjudul “Ketimpangan yang Semakin Lebar”

INFOGRAFIK: ISMAWADI



- Korporasi seringkali dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan penerima manfaat dari hasil tindak pidana
- penegak hukum masih menghadapi kesulitan dalam mengungkap pelaku utama pencucian uang, karena minimnya akses terhadap data korporasi
- Pemenuhan komitmen global (FATF, EITI, OGI)



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Kemampuan PPN/ Bappenas



KANTOR STAF PRESIDEN

Beneficial Ownership di Indonesia



Sebelum 2015

- Regulasi di Perpajakan
- Regulasi di Perbankan
- Regulasi di Perdagangan
- Regulasi di Keuangan
- Regulasi PPATK

2015-2016

- Kajian *Apakah Hanya Janji Kosong? Mengkaji Janji-Janji G20 Mengenai Beneficial Ownership* (Transparency International)
- Kajian *Transparansi Beneficial Ownership di Indonesia* (KPK dengan FHUI dan FEB UGM)
- Standar EITI
- Anti Corruption Summit
- Deklarasi Paris - OGP

2017-2018

- Road Map BO - EITI
- Indonesia tuan rumah Global Conference BO
- Kajian Analisis Kesenjangan Antara Ketentuan Kepemilikan Manfaat Korporasi/ Perikatan Lainnya di Indonesia dengan Standar Internasional (KPK, PPATK, OJK, EY)
- Kajian Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp & Paper (APP) di Indonesia (Koalisi Anti Mafia Hutan)
- Perpres 13/2018

2019-2020

- Aksi PK 2019-2020
 - Regulasi sectoral → ESDM, Perkebunan, HGU
 - Basis data BO
 - MoU dan PKS penguatan dan pemanfaatan basis data
- Permenkumham 15/2019 – Tata Cara Penerapan BO
- Permenkumham 21/2019 – Pengawasan BO

2021-2022

- Peningkatan kepatuhan korporasi untuk declare BO
- Akses publik
- Pemanfaatan untuk penegakan hukum, perizinan dan pengadaan barang jasa

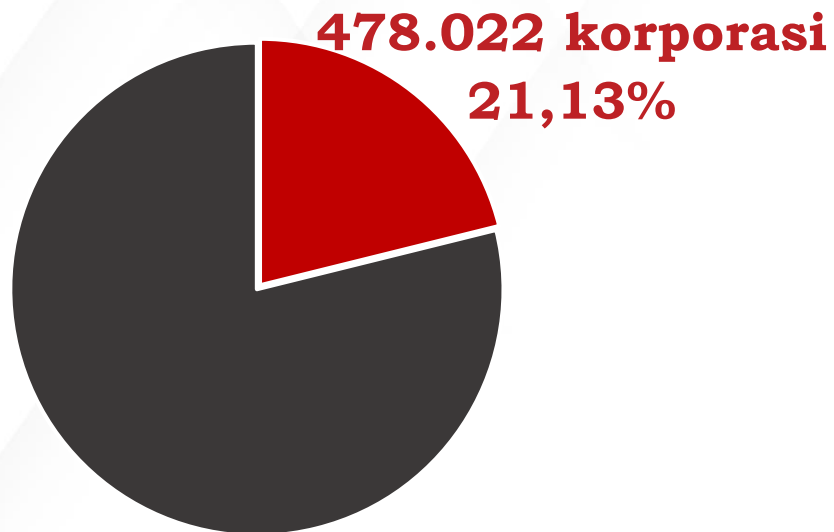
Aksi *Beneficial Ownership* 2021-2022



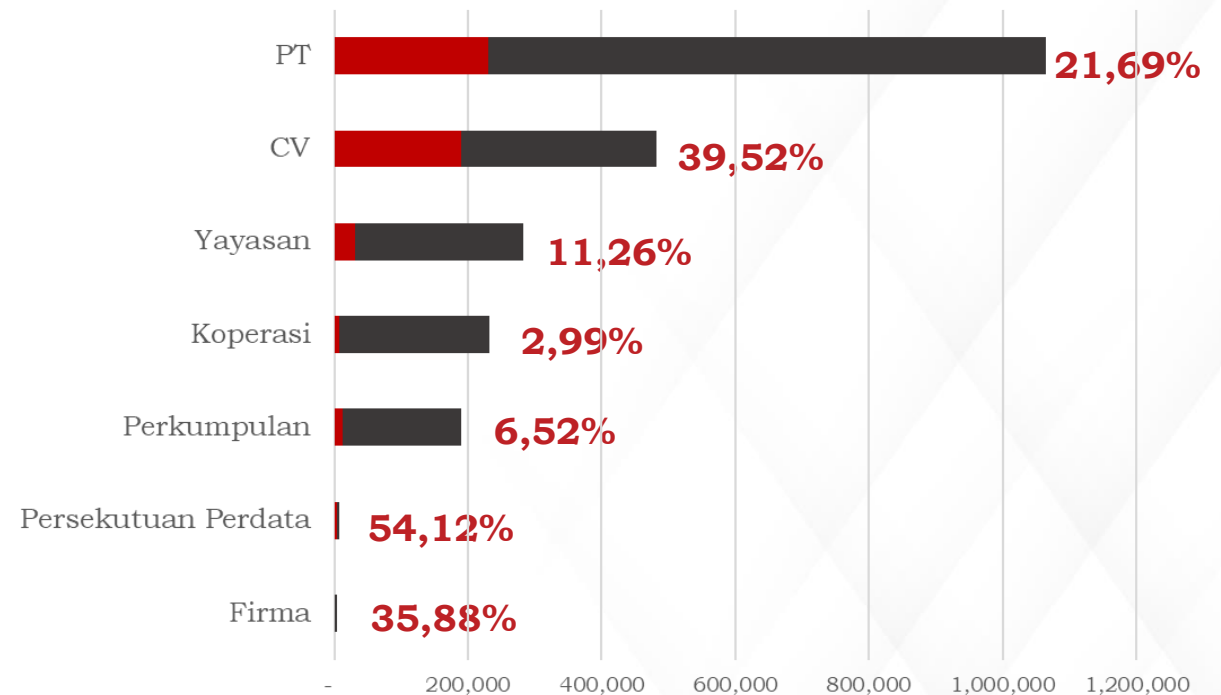
OUTCOME	OUTPUT	TARGET
Termanfaatkannya integrasi sistem basis data BO dalam penanganan perkara, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa	1. Tersedianya basis data yang berisikan <i>Beneficial Ownership</i> (BO)/Penerima Manfaat yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait	Seluruh korporasi telah mendeklarasikan BO
	2. Terbukanya akses publik terhadap basis data yang berisikan <i>Beneficial Ownership</i> (BO)/Penerima Manfaat	30% peningkatan akses oleh publik per triwulan
	3. Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan Aparat Penegak Hukum, Perizinan, dan Pengadaan Barang dan Jasa	10% peningkatan akses oleh APH per triwulan
		Seluruh pengajuan izin, telah mendeklarasikan/memanfaatkan data BO
		Seluruh proses pengadaan barang dan jasa telah memanfaatkan data BO

Output 1. Tersedianya Basis Data BO

Pelaporan Jumlah Korporasi yang telah melaporkan BO per 30 Juni 2021 tercatat sebanyak 478.022 korporasi (**21,13%**) dari jumlah korporasi sebanyak 2.262.080 korporasi.



*) termasuk korporasi yang dormant/tidak aktif



Namun demikian, penyediaan basis data BO tersebut **belum sepenuhnya didukung oleh KL** terkait karena **tidak adanya integrasi sistem**.

Sumber data: Ditjen AHU, diolah

Output 2. Tersedianya Akses Publik

- Data/informasi BO **belum dapat diakses oleh publik**
- Kajian Keterbukaan Informasi BO telah dilakukan atas kontribusi PWYP Indonesia. Secara umum, hasil kajian dimaksud menyebutkan bahwa informasi BO tidak sepenuhnya merupakan informasi yang dikecualikan, sehingga dapat dibuka/diakses oleh publik dengan penetapan layer kedalaman informasi.
- Hasil kajian tersebut dapat digunakan oleh KemenkumHAM untuk menyusun klasifikasi informasi BO

Output 3. Termanfaatkannya Informasi Data BO dalam Penanganan Perkara, Perizinan, dan Pengadaan Barang dan Jasa

- Data/informasi BO **belum sepenuhnya dimanfaatkan** oleh KL terkait.
- Dalam hal **Penanganan Perkara**, data/informasi BO telah diberikan kepada Kejaksaan Agung sebagaimana permintaannya. Penyediaan data/informasi BO tersebut masih dilakukan secara manual, karena Kejaksaan Agung belum memiliki akses. Sedangkan, PPATK dan KPK telah memiliki akses dan telah memanfaatkan data BO.
- Sebagai upaya memaksimalkan pemanfaatan data BO/korporasi, telah dikembangkan **Aplikasi Analisis dan Visualisasi Jejaring Data BO** yang dapat membantu KL untuk menelusuri keterhubungan antar entitas, baik orang atau korporasi
- Dalam hal **Perizinan**, pemanfaatan data/informasi BO dalam perizinan yang telah berjalan cukup baik hanya di Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian. Pemanfaatannya juga telah didukung dengan sistem manajemen data/informasi BO.
- Dalam hal **Pengadaan Barang dan Jasa**, data/informasi BO belum dimanfaatkan dalam mendukung analisis adanya *conflict of interest* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.



STRANAS PK

**SEKRETARIAT NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI
(SETNAS PK)**



Gedung Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada No.4,
Setiabudi, Jakarta - Indonesia



021-25578300 ext. 8014



<https://stranaspk.kpk.go.id>



@stranaspk_official



StranasPK Official



Kementerian
Dalam Negeri



Kementerian
PAN & RB



Kementerian PPN/
Bappenas



KANTOR STAF PRESIDEN